



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 7 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Tahun **2021-2026** Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Tahun **2021-2026**

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian pada tahun-



tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Kutai Timur, Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR



**ERY MULYADI, SP., M.M**  
NIP. 19770427 200112 1 003  
Pembina TK.I / IVb



## DAFTAR ISI

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR                              | 2  |
| DAFTAR ISI                                  | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN                           | 7  |
| A. Latar Belakang                           | 7  |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja       | 8  |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah           | 18 |
| D. Landasan Hukum                           | 19 |
| E. Sistematika                              | 20 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA                  | 22 |
| A. Rencana Strategis                        | 22 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2023               | 31 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023            | 32 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA               | 46 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi               | 48 |
| B. Realisasi Anggaran                       | 59 |
| C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 60 |
| BAB IV PENUTUP                              | 64 |
| LAMPIRAN                                    |    |
| SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH               |    |
| MATRIKS RENSTRA                             |    |
| SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA        |    |
| PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH  |    |

# **BAB I PENDAHULUAN**



**BAB I**



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan



pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika persandian dan statistik. Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas: melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika persandian dan statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

berikut:



## **A. Kepala Dinas**

### **a. Tugas Pokok**

Menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik Publik;
3. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan *e-Government*;
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Persandian;
5. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Statistik;
6. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

## **B. Sekretaris**

### **a. Tugas Pokok**

Memberikan pelayanan Administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

### **b. Fungsi**

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;



2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
4. Pengelolaan urusan ASN.

### **B.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **a. Tugas**

Melakukan urusan yang meliputi : Persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Daerah.

#### **b. Fungsi**

1. Penyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan dinas;
2. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
3. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
4. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
6. Penatausahaan kepegawaian.

### **B.2. Sub Bagian Keuangan**

#### **a. Tugas**

1. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
2. Penatausahaan; dan
3. Akuntansi, verifikasi dan pembukuan.



b. Fungsi

1. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
2. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan verifikasi keuangan; dan
4. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

**C. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan**

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian serta Pengembangan teknis bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan ;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis seksi Pengelolaan Opini dan Media Komunikasi Publik;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pelayanan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik ;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Kemitraan Media Komunikasi Publik dan Kehumasan;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan laporan masing-masing seksi dibawahnya;



7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya;
8. Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik; dan
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### **D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian**

##### **a. Tugas**

Membantu kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.

##### **b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
2. Penyiapkan bahan koordinasi perencanaan program bidang Teknologi Informasi Komunikasi;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Data dan Integritas Sistem Informasi;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Pengelolaan Data dan



Integritas Sistem Informasi dan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;  
dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya

#### **E. Bidang Aplikasi Informatika**

##### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika.

##### **b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Aplikasi Informatika;
2. Penyiapan bahan perumusan koordinasi perencanaan program bidang Aplikasi Informatika;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Domain dan aplikasi;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan *e-Government*;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Domain dan aplikasi, Pengelolaan *e-Government* dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya.



## **F. Bidang Statistik**

### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian teknis bidang Statistik.

### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **G. Unit Pelaksanaan Tugas Daerah**

Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

## **H. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana**

1. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintah dan Pembangunan;



4. Jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan beban kerja;
5. Jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Jabatan Fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh ASN yang mempunyai syarat dan ketentuan Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina masing-masing;
7. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

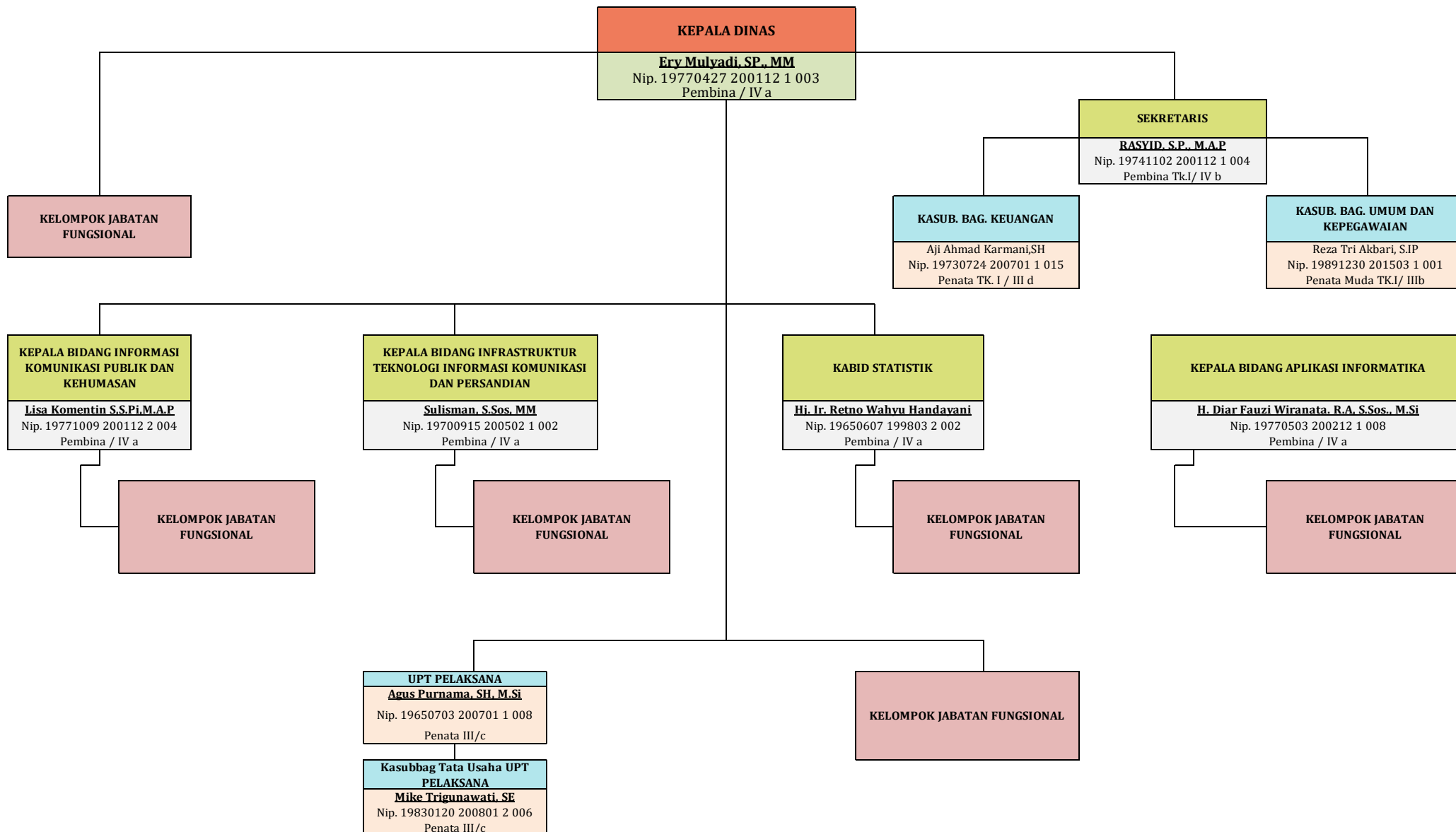
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur

Gambar 1.1.





**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**





## A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Tersedianya Infrastruktur TIK untuk memenuhi layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara merata dan proporsional di semua wilayah Kab. Kutai Timur;



2. Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat;
4. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo III-12 Persandian dan Statistik merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang TIK melalui literasi digital sehingga terwujud masyarakat Kutai Timur yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan TIK. Disamping itu dengan dukungan infrastruktur TIK akan mendorong percepatan transformasi digital di Kab. Kutai Timur sehingga yang dapat mewujudkan masyarakat digital dan ekonomi digital.

## **B. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 adalah :

- |         |                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN<br>Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.        |
| BAB II  | PERENCANAAN KINERJA<br>Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.                                                        |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA<br>Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV  | PENUTUP                                                                                                                        |

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan **Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor ... Tahun ...** tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga



Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

**“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu pada Misi 3 dan 4, yaitu :



Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata dan Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi 3.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Kutai Timur**

| NO  | TUJUAN                                                                                                                          | SASARAN                                                         | INDIKATOR KINERJA              | TARGET KINERJA PADA TAHUN |             |             |             |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|     |                                                                                                                                 |                                                                 |                                | 2022                      | 2023        | 2024        | 2025        | 2026    |
| (1) | (2)                                                                                                                             | (3)                                                             | (4)                            | (5)                       | (6)         | (7)         | (8)         | (9)     |
| 1   | Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi |                                                                 | .....<br>.....                 | xx                        | xx          | xx          | xx          | xx      |
|     |                                                                                                                                 | 1. Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | Cakupan Layanan Telekomunikasi | 77.3<br>7 %               | 80.4<br>8 % | 83.1<br>7 % | 85.4<br>8 % | 87.48 % |
| 2   | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui                                                   |                                                                 |                                |                           |             |             |             |         |



| NO  | TUJUAN          | SASARAN                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                      | TARGET KINERJA PADA TAHUN |             |             |             |         |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|     |                 |                                                                                         |                                                                        | 2022                      | 2023        | 2024        | 2025        | 2026    |
| (1) | (2)             | (3)                                                                                     | (4)                                                                    | (5)                       | (6)         | (7)         | (8)         | (9)     |
|     | pemanfaatan TIK |                                                                                         |                                                                        |                           |             |             |             |         |
|     |                 | 2. Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber opti | 25.7<br>1 %               | 34.2<br>9 % | 48.5<br>7 % | 62.8<br>6 % | 77.14 % |
|     |                 |                                                                                         | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                | ada                       | ada         | ada         | ada         | ada     |

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian periode 2021-2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu



tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian **Kabupaten Kutai Timur**

| N<br>O | TUJUAN/ SASARAN<br>STRATEGIS                                                                                | INDIKATOR<br>KINERJA | SATUAN                                                 | PENJELASAN              |                                                            |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|        |                                                                                                             |                      |                                                        | DEFINISI<br>OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS<br>PERHITUNGAN                             | SUMBER<br>DATA |
|        |                                                                                                             |                      |                                                        |                         |                                                            |                |
| 1.     | Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi | 1.1.                 | Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang TIK | .....                   | Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang TIK     | .....          |
|        |                                                                                                             |                      |                                                        |                         | Jumlah Aparatur Diskominfo                                 |                |
| 2      | Terwujudnya Layanan public yang berbasis TIK                                                                | 2.1                  | Jumlah Website Pemkab/OPD                              | .....                   | Jumlah Website OPD yang memiliki standar sesuai muatan TIK | .....          |
|        |                                                                                                             |                      |                                                        |                         | Jumlah OPD di Kutim                                        |                |



|   |                                                  |     |                                                   |       |       |                                                                |       |
|---|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                  | 2.2 | Jumlah Sistem Komunikasi antar OPD / Terintegrasi |       |       | Jumlah Aplikasi OPD yang Terintegrasi                          |       |
|   |                                                  |     |                                                   |       |       | Jumlah kapasitas yang tersedia di Data Center                  |       |
|   |                                                  | 2.3 | Persentase layanan Jaringan Internet Masyarakat   |       |       | Jumlah kecamatan/desa yang terjangkau Jaringan Internet        |       |
|   |                                                  |     |                                                   |       |       | Jumlah Kecamatan/Desa di Kutim                                 |       |
| 3 | Tersedianya layanan informasi bagi masyarakat    | 3.1 | Persentase informasi/pengaduan masyarakat         | ..... | ..... | (N-1)-N                                                        | ..... |
|   |                                                  |     |                                                   |       |       | N-1                                                            |       |
|   |                                                  |     |                                                   |       |       | (N-1) : Pengaduan thn sebelumnya<br>N : Pengaduan thn berjalan |       |
| 4 | Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat | 4.1 | Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM          |       |       | Jumlah pemberdayaan KIM di Kecamatan/Desa                      |       |
|   |                                                  |     |                                                   |       |       | Jumlah Kecamatan/Desa                                          |       |



|   |                                                                                          |                        |                                                                       |  |  |                                                                          |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                          | 4.2                    | Persentase penyebaran informasi melalui Radio, Media Cetak dan Online |  |  | Jumlah informasi melalui Radio, Media Cetak dan Online                   |  |
|   |                                                                                          |                        |                                                                       |  |  |                                                                          |  |
| 5 | Tersedianya data Pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan akurat | 5.1                    | Jumlah Dokumen data PDRB                                              |  |  | Jumlah Dokumen data PDRB                                                 |  |
|   |                                                                                          |                        |                                                                       |  |  | Target                                                                   |  |
|   |                                                                                          | 5.2                    | Jumlah dokumen Kutim dalam angka dan Kecamatan dalam angka            |  |  | Jumlah dokumen Kutim dalam angka dan Kecamatan dalam angka               |  |
|   |                                                                                          |                        |                                                                       |  |  | Target                                                                   |  |
| 6 | Terselenggaranya urusan Persandian                                                       | Jumlah penyelenggaraan |                                                                       |  |  | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD |  |



|  |  |                                     |  |  |                               |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
|  |  | Persantian untuk keamanan Informasi |  |  | Jumlah total Perangkat Daerah |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023



## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 :

**Tabel 2.3**

### **Rencana Kerja Tahun 2023**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

#### **Kabupaten Kutai Timur**

| NO  | TUJUAN                                                                                                  | SASARAN |                                     | INDIKATOR KINERJA              | SAT.  | TARGET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)     |                                     | (4)                            | (5)   | (6)    |
| 1   | Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap |         |                                     | .....<br>.....                 | ..... |        |
|     |                                                                                                         | 1.1     | Tersedianya Infrastruktur Teknologi | Cakupan Layanan Telekomunikasi | Paket | 7      |



|   |                                                                                                 |     |                                                                         |                                                               |                     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|   |                                                                                                 |     | Informasi dan Komunikasi                                                |                                                               |                     |     |
| 2 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK |     | .....<br>.....                                                          | .....<br>.....                                                | .....               | xx  |
|   |                                                                                                 | 2.1 | Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik | Tersedianya system data dan statistic yang terintegrasi       | ada                 | ada |
|   |                                                                                                 |     |                                                                         | Persentase OPD yang terkoneksi jaringan                       | %                   | 35  |
|   |                                                                                                 |     |                                                                         | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Orang               | 8   |
|   |                                                                                                 |     |                                                                         | Persentase OPD yang menyampaikan Informasi Publik             | OPD                 | 26  |
|   |                                                                                                 |     |                                                                         | Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik   | Titik Internet Desa | 77  |
|   |                                                                                                 |     |                                                                         | Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terintegrasi           | Aplikasi            | 2   |



|  |  |  |  |                                                                                                                     |               |            |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|  |  |  |  | Jumlah Perangkat daerah Yang terkoneksi jaringan Fiber Optik                                                        | OPD           | 38         |
|  |  |  |  | Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online<br>Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi public | Layanan       | 150        |
|  |  |  |  | Persentase Tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi                                               | %             | 80,48      |
|  |  |  |  | Jumlah Penyebaran Informasi melalui media (eletronik, cetak dan online)                                             | Siaran Berita | 365<br>720 |
|  |  |  |  | Persentase OPD yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi                                                           | %             | 35         |
|  |  |  |  | Jumlah Layanan pengamanan                                                                                           | Paket         | 1          |



|  |  |  |  |                                                               |     |     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  |  |  |  | informasi dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur          |     |     |
|  |  |  |  | Persentase OPD yang menyediakan data statistik sektoral       | OPD | 35  |
|  |  |  |  | Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan | %   | 100 |
|  |  |  |  | Persentase Aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat             | %   | 50  |

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tahun 2023

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten



Kutai Timur Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 3 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023**

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA |                                                                                | SATUAN                               | TARGET      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                   | 3                 |                                                                                | 4                                    | 5           |
| 1  | Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1.1               | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan | Dokumen                              | 8           |
|    |                                                                                                                                                     | 1.2               | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah                                    | Dokumen                              | 3           |
| 2  | Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat.                                                                                                   | 2.1               | Terlaksananya Penyebaran Informasi publik melalui media Online dan Elektronik  | Tayang                               | 150         |
|    |                                                                                                                                                     | 2.2               | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Informasi dan komunikasi Publik     | OPD<br>Billboard<br>Unit Call Center | 5<br>1<br>1 |
| 3  | Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat.                                                                 | 3.1               | Tersedianya Peralatan/Perangkat Jaringan TIK                                   | Unit                                 | 1           |
|    |                                                                                                                                                     | 3.2               | Jumlah Kapasitas Bandwith yang dikelola DISKOMINFO-SP                          | MBPS                                 | 300         |



|   |                                                                                          |                                                             |                                                                             |           |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|   |                                                                                          | 3.3                                                         | Tersedianya Perangkat Jaringan TIK/LAN/DC                                   | Paket     | 7   |
| 4 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota             | 4.1                                                         | Terlaksanya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah   | Layanan   | 150 |
|   |                                                                                          | 4.2                                                         | Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kebijakan | 10  |
| 5 | Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap dan akurat | Penguatan Kelembagaan Forum satu data Kabupaten Kutai Timur |                                                                             | Kali      | 6   |

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian :



**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Tahun 2023**

| NO<br>. | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                              | TARGET   | ANGGARAN       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1       | 2                                                                 | 3                                                                                                                 | 4        | 5              |
| 1       | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Dinas Kominfo SP                                    | 100 %    | 14.420.446.759 |
|         |                                                                   | Persentase Aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat                                                                 | 50 %     |                |
| 2       | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik               | Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi publik                                                           | 26 OPD   | 21.882.135.283 |
|         |                                                                   | Jumlah Tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi dari masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 Jam | 55 Orang |                |



|   |                                            |                                                                         |                          |                |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|   |                                            | Jumlah Penyebaran Informasi melalui media (eletronik, cetak dan online) | 365 Siaran<br>720 Berita |                |
| 3 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika   | Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik             | 77 Titik                 | 15.638.115.912 |
|   |                                            | Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terintegrasi                     | 2 Aplikasi               |                |
|   |                                            | Jumlah Perangkat daerah Yang terkoneksi jaringan Fiber Optik            | 38 OPD                   |                |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                 | Ada                      | 1.752.865.277  |
|   |                                            | Persentase OPD yang menyediakan                                         | 70 %                     |                |



|        |                                                               |                                                                               |         |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|        |                                                               | data statistik sektoral                                                       |         |                  |
| 5      | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase OPD yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi                     | 35 %    | 272.000.000      |
|        |                                                               | Jumlah Layanan pengamanan informasi dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timu | 1 Paket |                  |
| Jumlah |                                                               |                                                                               |         | 53.965.563.231,- |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



**Tabel 2.6**

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023**

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA |                                                                                | SATUAN                                          | 6TARGE T          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                   | 3                 |                                                                                | 4                                               | 5                 |
| 1  | Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1.1               | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan | Dokumen                                         | 8                 |
|    |                                                                                                                                                     | 1.2               | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah                                    | Dokumen                                         | 3                 |
| 2  | Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat.                                                                                                   |                   | Terlaksananya Penyebaran Informasi publik melalui media Online dan Elektronik  | Tayang                                          | 150               |
|    |                                                                                                                                                     |                   | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Informasi dan komunikasi Publik     | OPD<br>Billboard<br>Unit Call Center<br>Unit VT | 11<br>1<br>1<br>9 |
| 3  | Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat                                                                  |                   | Tersedianya Peralatan/Perangkat Jaringan TIK                                   | Unit                                            | 1                 |
|    |                                                                                                                                                     |                   | Jumlah Kapasitas Bandwith yang dikelola DISKOMINFOSP                           | MBPS                                            | 300               |
|    |                                                                                                                                                     |                   | Tersedianya Perangkat Jaringan TIK/LAN/DC                                      | Paket                                           | 7                 |
| 4  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |                   | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah    | Layanan                                         | 150               |



|   |                                                                                          |                                                                             |           |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|   |                                                                                          | Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kebijakan | 10 |
| 5 | Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap dan akurat | Penguatan Kelembagaan Forum satu data Kabupaten Kutai Timur                 | Kali      | 6  |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Tahun 2023**

| NO . | PROGRAM/ KEGIATAN                                           | INDIKATOR KINERJA                                                              | TARGET | ANGGARAN       |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1    | 2                                                           | 3                                                                              | 4      | 5              |
| 1    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Dinas Kominfo SP | 100 %  | 28.862.227.357 |
|      |                                                             | Persentase Aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat                              | 50 %   |                |
| 2    |                                                             | Persentase OPD yang telah                                                      | 26 OPD | 52.035.826.655 |



|   |                                                     |                                                                                                                   |                          |                |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|   | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | menyampaikan informasi publik                                                                                     |                          |                |
|   |                                                     | Jumlah Tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi dari masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 Jam | 55 Orang                 |                |
|   |                                                     | Jumlah Penyebaran Informasi melalui media (eletronik, cetak dan online)                                           | 365 Siaran<br>720 Berita |                |
| 3 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika            | Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik                                                       | 77 Titik                 | 56.360.765.002 |
|   |                                                     | Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terintegrasi                                                               | 2 Aplikasi               |                |
|   |                                                     | Jumlah Perangkat                                                                                                  | 38 OPD                   |                |



|        |                                                               |                                                                               |         |                 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|        |                                                               | daerah Yang<br>terkoneksi<br>jaringan Fiber<br>Optik                          |         |                 |
| 4      | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                       | Ada     | 2.252.865.277   |
|        |                                                               | Persentase OPD yang menyediakan data statistik sektoral                       | 70 %    |                 |
| 5      | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase OPD yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi                     | 35 %    | 272.000.000     |
|        |                                                               | Jumlah Layanan pengamanan informasi dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timu | 1 Paket |                 |
| Jumlah |                                                               |                                                                               |         | 137.258.816.014 |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**





### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh



berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Tinggi         | $91 \leq 100$       |
| 2  | Tinggi                | $76 \leq 90$        |
| 3  | Sedang                | $66 \leq 75$        |
| 4  | Rendah                | $51 \leq 65$        |
| 5  | Sangat Rendah         | $\leq 50$           |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan



Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                 | Indikator Kinerja              | Target  | Realisasi | Capaian<br>% | Kategori | Sumber<br>Data |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 1   | Menyediakan dukungan infrastruktur | Cakupan Layanan Telekomunikasi | 80.48 % | 80.48 %   | 100%         | ST       |                |



|   |                                                                                               |     |                                                                         |         |      |      |    |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----|--|
|   | TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi  |     |                                                                         |         |      |      |    |  |
| 2 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK | 2.1 | Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik | 34.29 % | 35 % | 102% | ST |  |
|   |                                                                                               | 2.2 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                 | Ada     | ada  | Ada  |    |  |

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.2, sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 berada pada kriteria Sangat Tinggi dengan interval nilai realisasi diatas 91%, yaitu 100% dan 102%



Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

| No.      | Tujuan/Sasaran                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                       | 2022   |           |            | 2023   |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|
|          |                                                                                                                                 |                                                                         | Target | Realisasi | % Capaian  | Target | Realisasi | % Capaian  |
| <b>1</b> | Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                          | 77.37  | 77.37     | <b>100</b> | 80.48  | 80.48     | <b>100</b> |
| <b>2</b> | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK                                   | Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik | 25.71  | 25.71     | <b>100</b> | 34.29  | 35,00     | <b>102</b> |



|  |  |                                                                        |     |     |     |     |     |     |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  | Tersedia<br>sistem<br>data<br>dan<br>statistik<br>yang<br>terintegrasi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Tabel 3.3, Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengalami kenaikan sebesar 1,04% dan 1,36%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No | Tujuan/Sasaran                                                                                                                  | Indikator Kinerja              | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                               | 3                              | 4                            | 5                 | 6=4/5*100        |
| 1  | Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi | Cakupan Layanan Telekomunikasi | 80,48                        | 87,48             | 91,99            |
| 2  |                                                                                                                                 |                                | 35,00                        | 77,14             | 45,37            |



|  |                                                                                               |                                                                         |     |     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK | Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik |     |     |  |
|  |                                                                                               | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                 | Ada | Ada |  |

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel 3.4 diatas Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur terealisasi sebesar 80,48% dan 35% dari target 80,48% dan 34,29 atau prosentase capaian tahun 2023 sebesar 100% dan 102%. Sedangkan untuk pencapaian tahun 2023 terhadap tahun 2026 (akhir Renstra) mencapai 99,01% dan 45,37%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

| No. | Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target    | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.  | <b>Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik</b>             |           |           |           |                                 |                       |
|     | <b>Indikator Kinerja :</b>                                                                                                                                             |           |           |           |                                 |                       |
|     | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Perangkat Daerah                                                                                          | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 %     |                                 |                       |
|     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%      |                                 |                       |
|     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 %     |                                 |                       |
|     | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 44 Orang  | 44 Orang  | 100%      |                                 |                       |
|     | Tersedianya Gaji TK2D                                                                                                                                                  | 51 Orang  | 51 Orang  | 100%      |                                 |                       |
|     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 4 Dokumen | 4 Dokumen |           |                                 |                       |
|     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD                                                                                                            | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 %     |                                 |                       |
|     | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 %     |                                 |                       |
|     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                       | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100 %     |                                 |                       |



|    |                                                                       |                 |                 |       |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--|--|
|    | Tersedianya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah               | 8 Orang         | 8 Orang         | 100 % |  |  |
|    | Terpenuhiya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 7 Laporan       | 7 Laporan       | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan                   | 6 Paket         | 6 Paket         | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 31 Laporan      | 31 Laporan      | 100 % |  |  |
|    | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan                    | 6 Unit          | 6 Unit          | 100%  |  |  |
|    | Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah                   | 3 Laporan       | 3 Laporan       | 100%  |  |  |
|    | Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100%            | 100%            | 100%  |  |  |
|    | Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang terpelihara/direhabilitasi | 5 Paket         | 5 Paket         | 100%  |  |  |
|    | <b>Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat</b>               |                 |                 |       |  |  |
| 2. | <b>Indikator Kinerja :</b>                                            |                 |                 |       |  |  |
|    | Jumlah Dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik             | 1 paket dokumen | 1 paket dokumen | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 20 Dokumen      | 20 Dokumen      | 100 % |  |  |



|    |                                                                                                        |                                                |                                                |       |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--|--|
|    | Tersedianya Pelayanan Informasi                                                                        | 1 Paket Pelayanan                              | 1 Paket Pelayanan                              | 100%  |  |  |
|    | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                          | 1 Paket Pelayanan                              | 1 Paket Pelayanan                              | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                   | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                                      | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit                                         | 1 Unit                                         | 100%  |  |  |
| 3. | <b>Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat</b>              |                                                |                                                |       |  |  |
|    | <b>Indikator Kinerja :</b>                                                                             |                                                |                                                |       |  |  |
|    | Tersedianya Infrastruktur TIK                                                                          | 150 titik Internet Desa<br>50 CCTV<br>11 Tower | 150 titik Internet Desa<br>50 CCTV<br>11 Tower | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola                                                      | 23 Unit                                        | 23 Unit                                        | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                             | 2 Dokumen                                      | 2 Dokumen                                      | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan                                  | 150 Layanan                                    | 150 Layanan                                    | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Dokumen Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan smart                   | 3 Dokumen                                      | 3 Dokumen                                      | 100%  |  |  |
|    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                          | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                                      | 100%  |  |  |
| 4. | <b>Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang Lengkap dan Akurat</b>        |                                                |                                                |       |  |  |
|    | <b>Indikator Kinerja :</b>                                                                             |                                                |                                                |       |  |  |



|    |                                                                                                |           |           |       |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--|--|
|    | Jumlah OPD yang menyediakan data Statistik Sektoral                                            | 35 opd    | 35 opd    | 100 % |  |  |
|    | Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yg Terintegrasi | 10 Orang  | 10 Orang  | 100 % |  |  |
|    | Jumlah Infrastruktur Statistik                                                                 | 1 Unit    | 1 Unit    | 100%  |  |  |
| 5. | <b>Terselenggaranya Urusan Persandian</b>                                                      |           |           |       |  |  |
|    | <b>Indikator Kinerja :</b>                                                                     |           |           |       |  |  |
|    | Terlaksananya Koordinasi Sistem Keamanan Jaringan Informasi                                    | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100%  |  |  |
|    | Tersedianya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi             | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % |  |  |

Capaian Kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 99,7 %

## TUJUAN DAN SASARAN

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                                                                                                              | Indikator<br>Kinerja           | %<br>Capai<br>an | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                | Indikator<br>Kinerja                                                                                                  | %<br>Capai<br>an | Menunjang<br>/Tidak<br>Menunjang |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|     | Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi | Cakupan Layanan Telekomunikasi |                  | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi publik                                                               |                  |                                  |
|     |                                                                                                                                 |                                |                  |                                                     | Persentase Tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi dari masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 Jam |                  |                                  |
|     |                                                                                                                                 |                                |                  |                                                     | Jumlah Penyebaran Informasi melalui media (elektronik, cetak dan online)                                              |                  |                                  |
|     |                                                                                                                                 |                                |                  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika            | Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik                                                           |                  |                                  |



|  |                                                                                                |                                                                      |  |                                                                |                                                                                    |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                                                                                                |                                                                      |  |                                                                | Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terintegrasi                                |  |  |
|  |                                                                                                |                                                                      |  |                                                                | Jumlah Perangkat daerah Yang terkoneksi jaringan Fiber Optik                       |  |  |
|  |                                                                                                | Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jalin fiber Optik |  | Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral                    | Persentase OPD yang menyediaka n data statistik sektoral                           |  |  |
|  |                                                                                                |                                                                      |  |                                                                | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                            |  |  |
|  | Meningkatka n kualitas penyelenggar an pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK |                                                                      |  | Program Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase OPD yang menggunaka n system Jaringan Komunikasi Sandi                  |  |  |
|  |                                                                                                | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi              |  |                                                                |                                                                                    |  |  |
|  |                                                                                                |                                                                      |  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Dinas Kominfoper sti |  |  |
|  |                                                                                                |                                                                      |  |                                                                | Persentase Aparatur yang                                                           |  |  |



|  |  |  |  |  |                                |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | mengikuti<br>bimtek/<br>diklat |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

## B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

| No. | Program/Kegiatan                                              | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 28.862.227.357 | 26.677.202.114 | 92,43%    |
| 2   | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik           | 50.406.445.455 | 48.459.774     | 96,14%    |
| 3   | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                      | 56.360.765.002 | 53.821.306.533 | 95,49%    |
| 4   | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | 2.252.865.277  | 2.222.544.398  | 98,65%    |
| 5   | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 272.000.000    | 241.551.135    | 88,81%    |



### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

| No. | Tujuan/Sasaran                                                                                                                  | Indikator Kinerja |           |           | Anggaran        |                 |           | Tingkat Efisiensi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                 | Target            | Realisasi | % Capaian | Anggaran        | Realisasi       | % Capaian |                   |
|     |                                                                                                                                 |                   |           |           | (Rp.)           | (Rp.)           |           |                   |
|     | Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi | 80.48             | 80.48     | 100%      | 106.767.210.457 | 102.280.769.214 | 95,80 %   |                   |
|     | Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi                                                                    | 34.29             | 35,00     | 102%      | 31.387.092.634  | 29.134.227.357  | 92,83%    |                   |

**Tergantung persennya, menghitung efisiensi : capaian kinerja dikurang persenn anggaran. Liat di excel.**

**Note:**

**Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien**

**Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka efisien**

Uraian penjelasan tabel :

.....



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

| No | Program/<br>kegiatan                                          | Indikator Kinerja |           |              | Anggaran         |                   |              | Tingkat<br>Efisiensi |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|    |                                                               | Target            | Realisasi | %<br>Capaian | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | %<br>Capaian |                      |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  | 100%              | 100%      | 100%         | 28.862.273.357   | 26.677.202.114    | 92,43%       |                      |
| 2  | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik           | 80,84%            | 80,84%    | 100%         | 50.406.445.455   | 48.459.774        | 96,14%       |                      |
| 3  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                      | 35%               | 35%       | 100%         | 56.360.765.002   | 53.821.306.533    | 95,49%       |                      |
| 4  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | Ada               | Ada       | Ada          | 2.252.865.277    | 2.222.544.398     | 98,65%       |                      |
| 5  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Ada               | Ada       | Ada          | 272.000.000      | 241.551.135       | 88,81%       |                      |
|    |                                                               |                   |           |              |                  |                   |              |                      |

Uraian penjelasan tabel :



.....

.....

.....

# **BAB IV**

## **PENUTUP**





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur menetapkan sebanyak 2 tujuan, 5 sasaran dengan 10 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 139.783.684.291,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 132.921.091.490,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 95,09 %.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Kutai Timur, Januari  
2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



**ERY MULYADI, SP., M.M**

NIP. 19770427 200112 1 003

Pembina TK.I / IVb

